



**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi Pembangunan Pada
Minat Studi Ekonomi Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan*

Diajukan Oleh:

FIRDAUSY MAULANA

NIM 16.10089

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

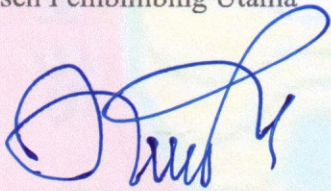
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA : FIDAUSY MAULANA
NIM : 16.10089
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
MINAT STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

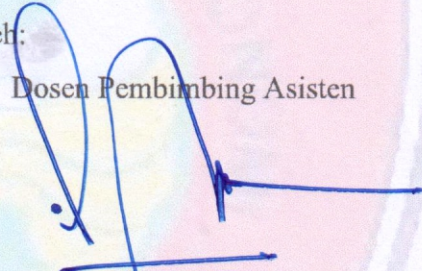
Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten


Dr. Sunarsih, M.P

NIDN: 0705026001

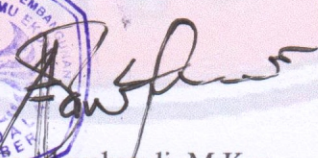

Drs. Zainollah, M.Si

NIDN: 0710116006

Mengetahui

Ketua Program Ekonomi Pembangunan




Drs. Gani wahyudi, M.Kes

NIDN: 0703036504

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 10 Maret 2021

Jam : 09.00 – 10.30

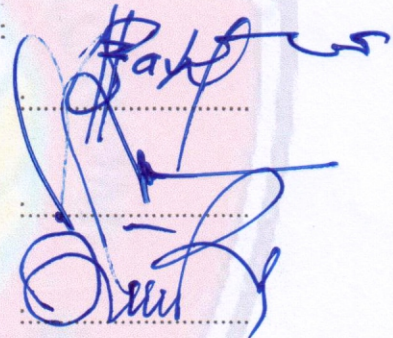
Tempat :

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Drs. Farid Wahyudi, M.Kes
Ketua Penguji

Drs. Zainollah, MS
Sekretaris Penguji

Dr. Sunarsih, MP
Anggota Penguji



Mengetahui:

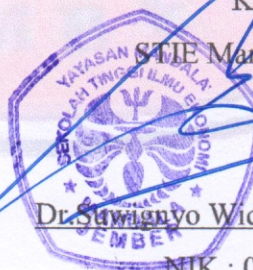
Ketua Program Studi,
Ekonomi Pembangunan



Dr. Farid Wahyudi, M.Kes

NIDN: 0703036504

Ketua,
STIE Mandala Jember



Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.

NIK : 0702106701

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FIRDAUSY MAULANA

NIM : 16.10089

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

MINAT STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : “KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR” merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 10 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Firdausy Maulana

MOTTO

**Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang
seharusnya mendatangi ilmu itu.**

(Imam Malik)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungannya serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya sampaikan rasa terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Elvi Sukarsih dan Ayahanda Edy Subagiyo yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, serta senantiasa mendoakan setiap langkah keberhasilanku.
2. Adik – adikku tercinta Putri Adilla
3. Bapak Drs. Farid Wahyudi M.Kes selaku Kaprodi Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Pembimbing Utama Skripsi DR. Sunarsih M.P serta Guru – guruku sejak taman kanak – kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.
4. Teman seperjuangan angkatan 2016 jurusan Ekonomi Pembangunan, terutama Tagor Surniya Sumargito, Sofriman dan Lailatul Fitriyah.. Terimakasih atas kebersamaannya dalam proses belajar dan berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan dari semester awal hingga proses skripsi ini.
5. Teman komunitas Ojek Online ORI-J (Organization Rider Independent Jember) dan SGA (Sahabat Gojek Arongan) yang telah menemani kebersaman selama ini.
6. Almamater.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur ucapan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR” dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana S-1 Ekonomi Pada Minat Studi Ekonomi Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan. Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Suwignyo Widagdo, SE,MM,MP selaku Ketua STIE Mandala Jember.
2. Bapak Drs. Farid Wahyudi, M.Kes selaku Kaprodi Jurusan Ekonomi Pembangunan.
3. Ibu Dr. Sunarsih, M.P selaku Pembimbing Utama Skripsi dan bapak Drs. Zainullah, M.Si selaku Pembimbing Asisten Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya guna membantu penulis selama ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan STIE Mandala Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama perkuliahan.
5. Teman seperjuangan angkatan 2016 jurusan Ekonomi Pembangunan, terimakasih atas kebersamaan yang selalu bersama dalam proses belajar dan berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan dari semester awal hingga proses skripsi ini.

6. Dari semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu terkait dalam Ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Demikian pernyataan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua yang telah berjasa. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.

Aamin yaa Rabbal Alamin.

Jember, 10 Maret 2021

Penulis

Firdausy Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHASAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
2.2 Kajian Teori.....	11
2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi	11

2.2.2	Teori Ketimpangan	11
2.2.3	Penyebab Ketimpangan	13
2.2.4	Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	15
2.2.5	Teori Typologi Klasen	17
2.2.6	Teori Indeks Williamson	19
2.3	Kerangka Konseptual	21
2.4	Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN.....		23
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.2	Jenis Penelitian	24
3.3	Identifikasi Variabel Penelitian	24
3.4	Metode Pengumpulan Data	25
3.5	Metode Analisis Data	26
3.5.1	Typologi Klasen.....	26
3.5.2	Indeks Williamson	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		29
4.1	Hasil Penelitian	29
4.1.1	Keadaan Geografis.....	29
4.1.2	Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.....	30
4.1.3	Keadaan Perekonomian Provinsi Jawa Timur	32
4.1.4	Keadaan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	35
4.2	Analisis Hasil Penelitian	36
4.2.1	Produk Domestik Regional Bruto.....	36

4.2.2 Analisis Data.....	38
4.2.2.1 Analisis Typologi Klasen	38
4.2.2.2 Analisis Indeks Williamson	41
BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran.....	45
5.3 Implikasi.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Tabel Pengelompokan Ekonomi Daerah Berdasarkan Tipologi Daerah	
Tabel 3.1 Tabel Tipologi Klassen	27
Tabel 4.1 Tabel Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2010-2018	31
Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi.....	32
Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur.....	35
Tabel 4.4 PDRB Atas Harga Koston di Provinsi Jawa Timur	36
Tabel 4.5 Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur.....	39
Tabel 4.6 Ketimpangan Jawa Timur 2014-2018.....	41
Tabel 4.7 Ketimpangan Tiap Kabupaten 2014-2018	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Timur	30
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.....	33
Gambar 4.3 Sektor-Sektor Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur ...	34
Gambar 4.4 Kuadran Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pdrb jawa timur menurut harga berlaku 2014-2018.....	47
Lampiran 2 Pdrb perkapita jawa timur menurut harga berlaku 2014-2018.....	48
Lampiran 3 ketimpangan provinsi jawa timur dari 2014-2018 pdrb atas harga koston pertahun.....	49

*DEVELOPMENT INEQUALITY BETWEEN DISTRICT / CITY IN EAST JAVA
PROVINCE*

By

Firdausy Maulana

Dr. Sunarsih, M.P

Drs.Zainollah, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine (1) to analyze the level of development inequality between districts in East Java Province (2) to classify development inequalities that occur between districts in East Java Province. This research is a quantitative descriptive study. The subject of this research is East Java's GRDP, which aims to find inequality. The object of this research is East Java inequality. Data collection was carried out using the method of recording and collecting data. Analyzed using the analysis tool Microsoft Excel software and using the Klassen Typology and Williamson Index analysis method. The results of the study show that there is only 1 Regency that is included in Quadrant IV and East Java Province has increased inequality from year to year, in which case the government must be able to increase GRDP so that conditions inequality is not increasing.

Keywords: GRDP, Inequality, East Java

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan khususnya bidang ekonomi adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan alternative yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistic. Dengan kata lain, proses pembangunan adalah proses memanusiakan manusia. Pembangunan di Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan membangun secara fisik, terkadang sering diartikan secara sempit sebagai membangun infrastruktur fisik. Kesimpulan UNDP tentang pembangunan dan pembangunan manusia adalah sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Konsep tersebut menjadikan penduduk sebagai tujuan akhir (Rustiadi et al.,2011).

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu proses dimana kegiatan yang dianggap penting serta wajib dilaksanakan oleh semua Negara, dikarenakan adanya globalisasi yang di ikuti dengan kemjuan teknologi yang sangat pesat dan perkembangan ilmu pengetahuan sudah berdampak pada perubahan serta pembaruan terhadap semua kriteria kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan seharusnya dapat mencakup seluruh kriteria baik secara ekonomi maupun secara sosial (Widi Asih, 2015). Seperti yang dijelaskan dalam Todaro (2006) yang menyebutkan bahwa sesungguhnya pembangunan adalah suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat agar berupaya dengan sekeras

mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, proses ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang tentunya lebih baik.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah, atau regional. Tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari PDRB, maka ini mengalami perubahan terhadap pendapatan perkapita, oleh sebab itu pertambahan PDRB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena terdapat kemungkinan timbulnya keadaan tersebut maka pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus dibedakan (Sirojuzilam, 2008).

Pembangunan yang saat ini telah dilaksanakan telah membuat masalah pembangunan tersendiri dan cukup kompleks. Pertumbuhan ekonomi makro pada pendekatan cenderung menghiraukan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang sangat besar. Rancangan program yang dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah saat ini sangat diperlukan (Groschin, 2014).

Masalah ini dibuktikan oleh penelitian Mahardiki dan Santoso tahun 2013 yang dapat menarik kesimpulan bahwa indeks Williamson tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan. Indeks Williamson tahun 2006 sebesar 0,667 sedangkan tahun 2011 sebesar 0,796. Sedangkan hasil dari Indeks Theil didapatkan tingkat ketimpangan di Indonesia cenderung menurun. Indeks Theil tahun 2006 sebesar 0,3707

sedangkan tahun 2011 sebesar 0,347. Ketimpangan Ekonomi juga ditemukan di Sumatera yakni terdapat lima provinsi yang memiliki indeks ketimpangan di atas rata-rata Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masing – masing daerah tidak dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di Sumatera (Yeniwati,2013).

Semenjak diterapkan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan perekonomian daerah masing-masing. Daerah - daerah semakin mempunyai kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut (Nehen, 2010). Tetapi tidak semua daerah mengalami proses pembangunan ekonomi yang berjalan sama. Ada beberapa daerah yang mencapai pembangunan yang lebih cepat, ada juga beberapa daerah yang lain mengalami pembangunan ekonomi yang lebih lambat. Dalam kejadian ini dapat menimbulkan ketimpangan atau disparitas pembangunan ekonomi antara suatu daerah dengan daerah yang lain.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya juga diikuti dengan pemerataan ekonomi yakni dengan cara mengurangi tingkat ketimpangan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi akan membuat pelebaran jarak pemisah antara suatu kelompok masyarakat dengan suatu kelompok lainnya. Ketimpangan dalam suatu pembangunan ekonomi antar wilayah adalah merupakan salah satu kriteria yang sudah umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah regional. Ketimpangan serta pemerataan menjadi masalah utama dalam suatu pembangunan daerah, bahkan ketimpangan ini akan menyebabkan

pertumbuhan ekonomi tidak bisa memiliki manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan yang sedang terjadi. Penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah daerah antara lain: kegiatan ekonomi wilayah daerah, lokasi yang digunakan untuk investasi, rendahnya tingkat mobilitas antar tiap daerah, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah, kondisi geografis suatu daerah, dan macetnya perdagangan antar suatu daerah (Tambunan, 2003).

Bedasarkan latar belakang masalah yang dapat diuraikan maka peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam penelitian yang berjudul **“Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini :

1. Seberapa besar tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Mengklasifikasikan Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis besarnya tingkat Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

2. Mengklasifikasikan Ketimpangan Pembangunan yang terjadi Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan yang terjadi di setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui Klasifikasi ketimpangan yang terjadi di Tingkat Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini memiliki batasan masalah hanya sampai di besar kecilnya ketimpangan yang terjadi di setiap kabupaten di provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini juga memiliki batasan yang hanya sampai dengan pengklasifikasian ketimpangan yang terjadi di provinsi Jawa Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ihsan Yoga Triyanto dan Yeremias T.Keban (2019) “Disparitas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Sleman”. Penelitian dapat mendeskripsikan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sleman pada periode tahun 2008-2016 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat Ketimpangan di daerah sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode tahun 2008-2016 yang di dapat dari sumber BPS, serta metode yang digunakan adalah Indeks Williamson, regresi panel dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat banyak berkontribusi tentang isu-isu perkembangan dan pembangunan daerah.

Mela Apriani Damayanti (2019) “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menggunakan data Kuantitatif dan data sekunder dengan periode tahun penelitian 2013-2017 dengan menambahkan metode dokumentasi data PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi yang besumber dari BPS dan BPMD provinsi Lampung yang terkumpul dan di analisis menggunakan Regresi Linier berganda. Sedangkan secara parsial PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap wilayah. Dan Aglomerasi secara parsial terhadap parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Maka dari itu Ekonomi Islam melarang adanya ketimpangan pembangunan wilayah.

Ali Cahyo Wibowo (2019) “Analisis Ketimpangan Perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (tahun 2012-2016)”. Analisis ini adalah penelitian ketimpangan ekonomi yang di ambil dari indeks gini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan IPM terhadap ketimpangan ekonomi. Dan data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapat dari BPS provinsi Jawa Timur dan alat analisis yang digunakan adalah Regresi panel yang diolah data dengan menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Variabel PDRB dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi dan variabel IPM mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi.

Arif Maulana (2019). “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017”. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih belum bisa di selesaikan di Indonesia adalah ketidaksetaraan antar daerah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Salah satunya adalah di Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah ini merupakan wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010-2017. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan data populasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Williamon dan Tipologi Klassen.

Dedi Budiman dan Eka Intan Kumalasari (2018). “Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat”. Dalam penelitian ini adalah menganalisis tipologi daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah papua di Papua Barat dengan menggunakan regresi data panel. Teknik analisis yang dipakai adalah tipologi daerah, indeks Theil dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang dominan pada kuadran pertama (maju) dan keempat (tertinggal) Tipologi Klassen.

Yesrinta As Hero (2017).“Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya tingkat ketimpangan yang terjadi antar Kecamatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2010-2014. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipologi Klassen, Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

Hendro Ekwarso, Taryono dan Isyandi (2016). “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan di Kota Dumai”. Penelitian ini mengimplementasikan pembangunan dan Konsentrasi yang tertuju pada wilayah tertentu yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Terutama perekonomian kota Dumai yang pada tahun 2010 mampu menghasilkan nilai PDRB Sebesar Rp. 17.495.472,60 juta atau tumbuh sebesar 4,55%. Dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 84,24 Juta. Teknik pengumpulan data ini dengan cara meghubungi langsung Lembaga yang mempublikasikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu BPS yang selanjutnya dilakukan

verifikasi sesuai dengan variabel analisis. Metode analisis ini menggunakan teknik analisis Indeks Williamson.

Jefri Tipka (2014) “Analisis Ketimpangan Antar Kecamatan di Kota Ambon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi Kecamatan di Kota Ambon, dan mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan antar Kecamatan di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Tipologi Klassen dan Indeks Williamson dan Korelasi Pearson serta data yang digunakan data PDRB tahun 2007-2010 dan jumlah penduduk tahun 2007-2010.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ihsan Yoga Triyanto dan Yeremias T.Keban (2019)	Disparitas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Sleman	Menggunakan analisis yang sama yaitu Indeks Williamson dan Menganalisis Ketimpangan Wilayah	Ada Perbedaan dalam alat analisis dan perbrdaan lainnya yaitu Objek penelitian dan Tahun Penelitian
2	Mela Apriani Damayanti (2019)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Menggunakan alat analisis yang sama yaitu Indeks Williamson dan menggunakan data PDRB	Penelitian Terdahulu menggunakan perspektif dalam Ekonomi Islam
3	Ali Cahyo Wibowo (2019)	Analisis Ketimpangan Perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (tahun 2012-2016)	Sama menggunakan data PDRB dan Menganalisis Ketimpangan antar wilayah	Penelitian Terdahulu menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu menggunakan Data Panel
4	Arif Maulana (2019)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017	Sama sama Menganalisis Ketimpangan Pembangunan antar kabupaten	Objek penelitan serta Tahun penelitian berbeda
5	Dedi Budiman dan Eka Intan Kumalasari (2018)	Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat	Analisis yang sama yaitu Tipologi Klassen dan Indeks Williamson serta Sama sama Meneliti tentang ketimpangan antar wilayah	Objek penelitian dan Tahun Penelitian berbeda
6	Yesprinta As Hero (2017)	Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014	Analisis yang sama yaitu Tipologi Klassen dan Indeks Williamson serta juga meneliti tentang ketimpangan	Objek penelitian dan Tahun Penelitian berbeda
7	Hendro Ekwarso, Taryono dan Isyandi (2016)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan di Kota Dumai	Analisis yang sama yaitu Indeks Williamson dan sama meneliti tentang ketimpangan wilayah	Objek penelitian dan Tahun Penelitian berbeda
8	Jefri Tipka (2014)	Analisis Ketimpangan Antar Kecamatan di Kota Ambon". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	Analisis yang sama yaitu Indeks Williamson dan Menganalisis tentang ketimpangan antar wilayah	Objek penelitian dan Tahun Penelitian berbeda

		pola dan struktur ekonomi Kecamatan di Kota Ambon		
--	--	--	--	--

Sumber: Ihsan dan Yeremias (2019), Mela (2019), Ali (2019), Arif (2019), Dedi dan Eka (2018), Yesprinta (2017), Hendro, Taryono dan Isyandi (2016), Jefri (2014)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Mengutip (Sirojuzilam, 2008) Pembangunan Ekonomi ialah suatu proses yang sifatnya pertentangan yang di dalamnya terlibat pada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi dan menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengurangi pengangguran dalam cakupan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi dilihat dari sudut pandangnya dikatakan sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan jalannya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Tingkat PDRB lajunya ini juga ditentukan pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari PDRB, ini maka mengalami perubahan terhadap pendapatan perkapita, oleh karena itu pertambahan kenaikan PDRB tidak mempunyai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena terdapat kemungkinan yang menimbulkan keadaan itu, maka pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus bisa dibedakan (Sirojuzilam, 2008).

2.2.2 Teori Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah adalah gejala umum yang sudah biasa terjadi di dalam proses pembangunan ekonomi

suatu daerah. Gejala ini tidak hanya terjadi pada Negara berkembang saja, akan tetapi pada Negara maju tetap saja bias terjadi walaupun tingkat ketimpangannya berbeda. Ketimpangan ini di sebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada setiap masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan setiap daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan jadi berbeda. Oleh karena itu tidak mengherankan bila setiap daerah biasanya terdapat daerah relatif maju (*developed region*) dan daerah yang relatif terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan ekonomi antar wilayah pada dasarnya terjadi dikarenakan struktur dan pola lokasi serta konsentrasi kegiatan ekonomi antar ruang (*spatial economics*) pada setiap daerah. (Sjafrizal, 2018:120).

Sangat penting di catat bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah sangat berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*income distribution*) antar rumah tangga atau kelompok masyarakat yang dalam suatu perekonomian. Ketimpangan ekonomi antar daerah adalah perbedaan perbedaan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal yang diukur dengan tingkat PDRB per kapita antar daerah. (Sjafrizal, 2018:119-120).

Ketimpangan antar wilayah biasanya di dasari terjadi dikarenakan struktur dan pola lokasi serta konsentrasi kegiatan ekonomi antar ruang (*Spatial economics*) pada suatu daerah. Struktur dan pola lokasi tersebut ditentukan oleh keuntungan lokasi dari setiap wilayah yang cenderung menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Hirschman (1958) transmisi pertumbuhan ekonomi antar

ruang juga tidak lancar sehingga dapat menyebabkan adanya daerah yang tumbuh cepat (Growing points) serta daerah yang tumbuh lambat (Lagging regions). (Sjafrizal, 2018:120-121).

Penelitian yang berhubungan dengan ketimpangan wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang masih berkembang, didapatkan bahwa selama bahwa tahap pertama pembangunan, ketimpangan wilayah menjadi lebih besar daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tertuju pada daerah tertentu. Dan pada tahap yang sudah lebih matang daripada pertumbuhan ekonomi terlihat adanya keseimbangan antara daerah dan Ketimpangan berkurang dengan pesat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain merupakan sesuatu yang sangat wajar, karena adanya perbedaan dari sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan setiap daerah. (Kuncoro, 2004).

Adapun jika ketimpangan itu terjadi sangat tinggi, biasanya dapat dipandang sebagai suatu yang sangat tidak adil. Akan ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan jika ketimpangan itu terjadi antara lain :

1. Akan terjadi ketidak efisiensi ekonomi terutama pada tidak adanya kolateral.
2. Bisa menyebabkan alokasi asset yang tidak efisien.
3. Dapat melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas (Todaro dan Smith, 2006).

2.2.3 Penyebab Ketimpangan

Penyebab terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor . Seperti yg ada dalam (Sjafrizal, 2012), penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah diantaranya :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam.

Perbedaan sumber daya alam ini akan berpengaruh dalam kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Wilayah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang rendah. Kondisi seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dan begitu pula sebaliknya.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis ini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan serta struktur kependudukan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku serta kebiasaan etos kerja yang dimiliki masyarakat tiap daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan lebih cenderung memiliki produktifitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi berbagai kegiatan perdagangan antar daerah serta migrasi yang dispori pemerintah atau migrasi spontan.

Dengan adanya mobilitas yang kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah yang lain yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan lebih cenderung tinggi sehingga membuat daerah terbelakang sulit untuk mendorong proses pembangunan.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat kepada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi seperti ini yang selanjutnya bisa mendorong proses pembangunan daerah lewat peningkatan penyediaan lapangan kerja serta tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Investasi adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan alokasi investasi yang besar, baik dari pemerintah atau swasta, akan lebih cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Bentuk ketimpangan pada dasarnya berlangsung serta berwujud dalam berbagai macam bentuk, aspek maupun dimensi. Selain itu, ketimpangan biasa dibedakan menjadi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal serta ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial (Dewi Yunistri, 2012).

2.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Faktor ekonomi masih menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan masalah paling utama pada Negara-negara sedang berkembang adalah pengangguran (unemployment) serta kemiskinan (poverty) yang merupakan tanda umum dari keterbelakangan

ekonomi. Seperti proses pembangunan pada tingkat nasional ataupun daerah di Indonesia yang masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah unsur penting dalam proses pembangunan. Sampai saat ini, pertumbuhan ekonomi adalah target utama dalam hal penyusunan rencana pembangunan nasional ataupun daerah disamping pembangunan fisik dan sosial. Pendekatan dalam perencanaan daerah lebih banyak bersifat lintas sektoral dengan memanfaatkan unsur-unsur tata ruang serta keuntungan lokasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan (Sjafrizal, 2014).

A. Teori Klasik

Menurut teori pandangan seorang ekonom Klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Strault Mill. Berpendapat bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) Jumlah penduduk, (2) Jumlah stok barang modal, (3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) Tingkat teknonologi yang dipakai (Sukirno, 1985).

Menurut (Boediono, 1985) pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka yang cukup panjang. Penekanan pada proses dikarenakan mengandung suatu unsur dinamis. Para teoritisi ilmu ekonomi pembangunan masa kini, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman, nyaman dan tentram (Arsyad, 1999).

B. Teori Neo Klasik

Pelopop teori ini yaitu adalah George H.Bort pada tahun 1960 (dikutip dalam Sjafrizal, 2008), menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat ditentukan oleh kemampuan wilayah itu sendiri untuk meningkatkan kegiatan produksi. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah dapat ditentukan oleh potensi wilayah itu sendiri, tapi juga bisa ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja serta mobilitas modal antar daerah.

Dalam Model Neo Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal ataupun tenaga kerja pada umumnya permulaan proses pembangunan yaitu adalah kurang lancar. Modal serta tenaga kerja ahli cenderung berkonsentrasi pada pembangunan wilayah yang cenderung melebar. Jika proses pembangunan terus berlanjut dan semakin bagus prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar.

2.2.5 Teori Tipologi Klassen

Seperti yang ada di dalam Sjafrizal (2012), untuk mengetahui wilayah yang cepat tumbuh dengan daerah yang tertinggal dapat menggunakan Alat analisis tipologi Klassen. Alat analisis ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan struktur ekonomi dan tingkat pembangunan. Ada empat kelompok daerah berdasarkan Analisis Tipologi Klassen yakni :

1. Wilayah yang cepat maju dan cepat tumbuh, yakni daerah yang mempunyai pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten di Provinsi i.

2. Wilayah maju tetapi tertekan, yakni daerah yang mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi daripada rata-rata Kabupaten di Provinsi I, akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah ketimbang rata-rata Kabupaten di Provinsi i.
3. Wilayah berkembang, yakni daerah yang mempunyai pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata dan tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada rata-rata Kabupaten di Provinsi i.
4. Wilayah tertinggal, yakni daerah yang mempunyai pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten di Provinsi i.

Berikut ini adalah tabel pengelompokan daerah berdasarkan Tipologi Klassen.

Tabel 2.2
Pengelompokan Ekonomi Daerah Berdasarkan Tipologi Daerah.

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan di atas rata-rata	Laju Pertumbuhan di bawah rata-rata
Pendapatan perkapita di atas rata-rata	Daerah Maju	Daerah Maju tapi tertekan
Laju Pertumbuhan di bawah rata-rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal

Sumber : (Sjafrizal, 2012)

Ketimpangan antara daerah yang cepat maju dan relatif tertinggal dapat dibuktikan melalui sebuah fakta bahwa di kawasan Asia Timur dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah tumbuh dengan cukup cepat, sedangkan di kawasan Amerika Latin dan Benua Afrika dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi tumbuh dengan sangat lambat (Todaro dan Smith, 2010).

2.2.6 Teori Indeks Williamson

Teori ketimpangan pembangunan antar daerah pada awalnya dilakukan adalah dalam Studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Secara perhitungan ilmu statistik, indeks ini adalah coefficient of variation yang pada umumnya biasa digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah. Meskipun indeks ini memiliki beberapa kelemahan, yakni sensitif terhadap definisi daerah yang digunakan dalam perhitungan, tetapi demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah.

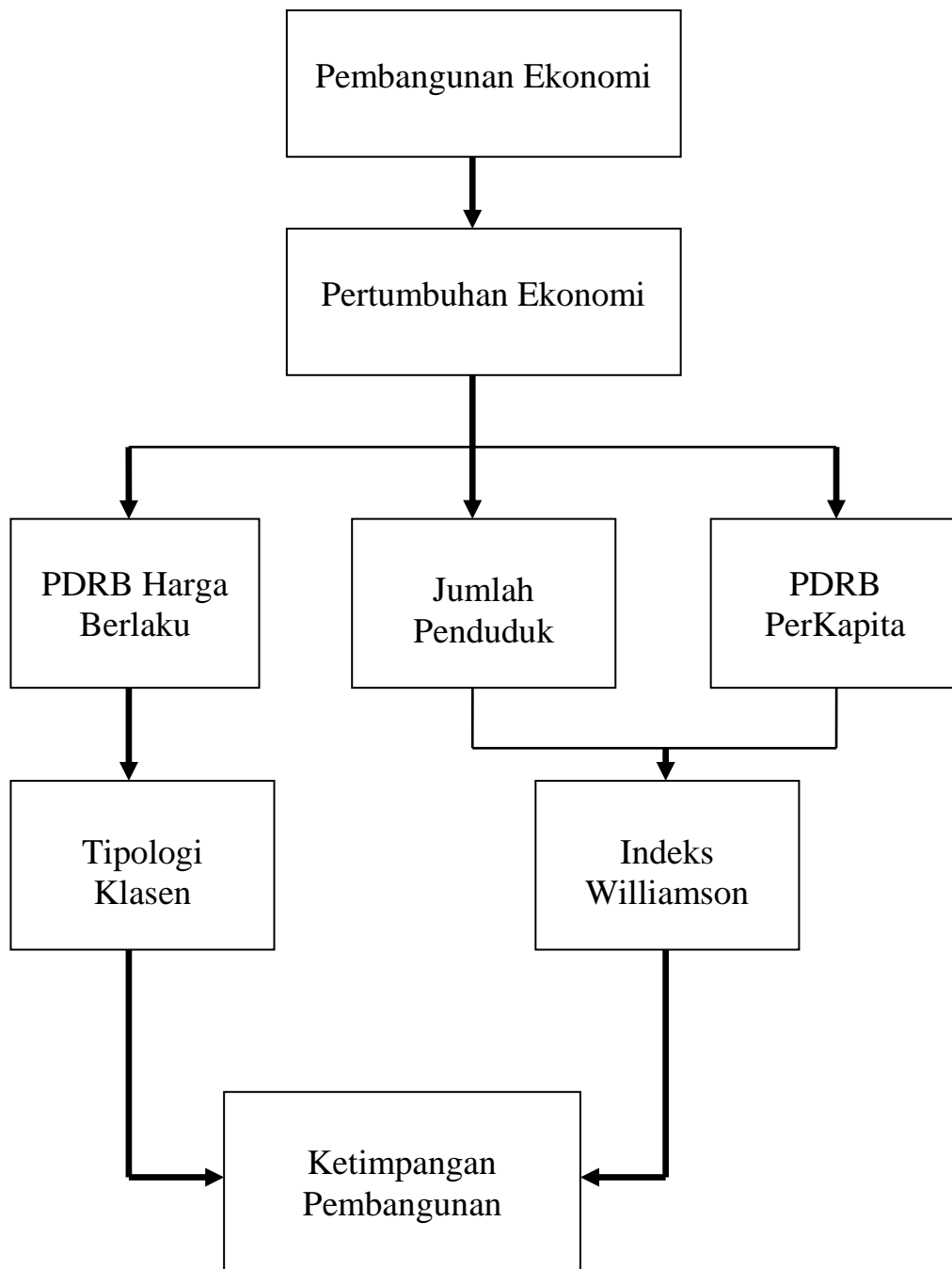
Beda dengan gini ratio yang biasa digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Indeks Williamson menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai dasar, dikarenakan yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar daerah bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat (Sjafrizal, 2018;129).

Indeks Williamson bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{IW} = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y} \mathbf{0} < \mathbf{IW} < \mathbf{1}$$

Dimana Y_i = PDRB per kapita daerah i , Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah, f_i = Jumlah penduduk daerah i dan n = Jumlah penduduk seluruh daerah. Sedangkan W digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang agar indeks ini bisa menjadi lebih stabil serta bisa dibandingkan dengan Negara maupun daerah yang lainnya. Hasil perhitungan angka indeks akan bergerak dari angka nol hingga dengan angka satu dengan pengertian jika mendekati angka 1 maka sangat timpang dan jika IW mendekati angka nol berarti sangat merata. (Sjafrizal, 2018:275).

2.3 Kerangka Konsetual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diuji, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori dan penelitian terdahulu, maka hasil dari hipotesis dalam pengajuan ini, peneliti mendeskripsikan sebagai berikut :

1. Diduga Tipologi Klassen berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
2. Diduga Indeks Williamson berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan mulai Januari 2021. Wilayah Provinsi Jawa Timur sendiri adalah provinsi yang memiliki wilayah yang paling luas di antara 6 provinsi di pulau jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor 2 di Indonesia sesudah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudra Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barong). Provinsi ini dihuni oleh kelompok etnis yang beraneka ragam, seperti suku Jawa, Suku Madura dan orang Tionghoa-Indonesia. Sebagian besar masyarakat di provinsi Jawa Timur menganut agama Islam, sekitar 96% dari semua total populasi. Agama lain Seperti Kristen, yang sebagian besar dianut oleh orang Tionghoa-Indonesia dan imigran dari Indonesia Timur dan Sumatera Utara, dan juga Agama Hindu yang kebanyakan dianut oleh suku Tengger di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan suku Bali yang mendalami bagian paling timur provinsi yang berbatasan dengan Bali.

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi provinsi dan juga seluruh bangsa, tetapi bahasa Jawa dan bahasa Madura adalah bahasa yang paling

sering digunakan di Provinsi Jawa Timur. Bahasa Indonesia hanya digunakan komunikasi antar etnis dan resmi. Jawa Timur terkenal sebagai pusat kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikasi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi sebesar 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat dokumentasi. Dengan menggunakan data kuantitatif serta memanfaatkan dokumen yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Dan Penelitian ini juga menggunakan literatur dan jurnal yang sesuai sebagai sumber bahan kajian.

3.3 Identifikasi Variabel Penelitian

Untuk Menyamakan Pemahaman tentang variabel – variabel yang digunakan dan menghindari perbedaan penafsiran, maka peneliti memberikan batasan definisi operasional, sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan tahun 2014-2018 adalah PDRB Provinsi Jawa Timur dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya yang dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun 2010. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB perkapita rata-rata Kabupaten/Kota yang jadi nilai ataupun angka Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018 dalam satuan persen.

2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah perubahan PDRB setiap tahun secara total atau masing-masing sektor di suatu wilayah, yang dihitung menurut harga konstan tahun 2010 jangka waktu tertentu dalam satuan persen. Laju PDRB yang dihitung menurut harga tetap tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2014-2018 dalam satuan persen.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita setiap kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah presentase perubahan PDRB yang dihitung menurut harga tetap tahun 2010 setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014-2018 dalam satuan persen.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan

Teknik pencatatan ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, yakni dengan mencatat data yang ada pada dokumen yang telah disediakan oleh instansi pemerintah atau lembaga Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data berkala atau *time series* yang didapat dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, maupun literatur serta jurnal yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan keadaan Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014-2018.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen adalah alat analisis yang digunakan untuk melihat pola pembangunan ekonomi antar setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada Penelitian ini, setiap Kabupaten akan diklasifikasikan menjadi empat golongan. Indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap Kabupaten yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam analisis ini :

1. Kuadran I (pertama) yaitu daerah/wilayah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki perekonomian dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur.
2. Kuadran II (kedua) yaitu daerah/wilayah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi akan tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur.
3. Kuadran III (ketiga) yaitu daerah/wilayah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi akan tetapi tingkat

pendapatan per kapitannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

4. Kuadran IV (keempat) yaitu daerah/wilayah yang relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.1 Tipologi Klassen

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan	Sektoral
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	Sektor maju dan tumbuh pesat	Sektor maju tapi tertekan
$s_i < s$	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Sektor relative tertinggal

3.5.2 Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bisa dianalisis dengan menggunakan rumusan sebagai berikut ini (Syafrizal, 1997):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y} \quad 0 < IW < 1$$

Keterangan

IW = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh wilayah

Hasil analisis dari perhitungan Indeks Williamson adalah seperti berikut ini: Apabila IW mendekati angka satu, maka menunjukkan ketimpangan pembangunan semakin melebar apabila IW mendekati angka nol maka menunjukkan ketimpangan pembangunan yang semakin kecil antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

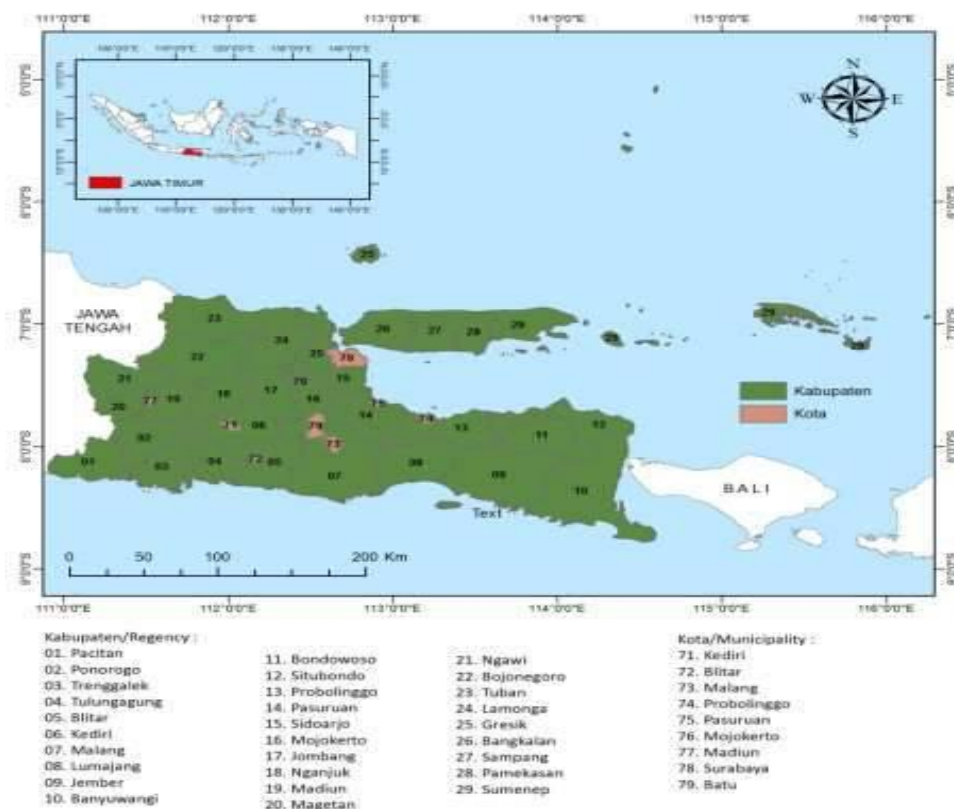
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang ada di Negara Indonesia terletak di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur terletak diantara 111,00 – 114,40 Bujur Timur dan 7,120 – 8,480 Lintang Selatan. Wilayah Jawa Timur memiliki musim sebanyak dua jenis setiap tahunnya, yakni musim kemarau dan musim hujan. Adapun Batas daerah Jawa Timur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa.
2. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali.
3. Di Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
4. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yakni Samudera Hindia.

Dilihat secara umum Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian besar yakni Jawa Timur daratan dan pulau Madura. Dan luas wilayah Jawa Timur terdiri dari 90 % dari total seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sementara luas Pulau Madura sekitar 10 %. Luas Provinsi Jawa Timur mencapai antara 47.799,75 km² dan terbagi menjadi 38 Kabupaten/kota dan terdiri dari 9 Kota, dengan 666 kecamatan memiliki 5.674 desa/kelurahan dengan status perdesaan dan 2.827 desa/kelurahan dengan bestatus perkotaan. Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi 3 dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran tinggi adalah daerah yang ketinggian rata-rata diatas 100 meter diatas permukaan laut. Dataran sedang mempunyai ketinggian antara 45-100 meter diatas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah dibawah 45 meter diatas permukaan laut. (BPS, Jawa Timur,2019)

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2019

4.1.2 Keadaan Penduduk Dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

Penduduk adalah aset pembangunan apabila penduduk tersebut diberdayakan secara optimal, akan tetapi juga bisa menjadi beban pembangunan apabila jika pemberdayaan tidak diimbangi dengan sumber

daya manusia yang memadai pada wilayah maupun daerah yang bersangkutan. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah provinsi Jawa Barat. Dan Jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2009 - 2018 setiap tahunnya terjadi peningkatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kota Surabaya yaitu sebesar 8.233,01 Jiwa dan kepadatan terendah berada di Banyuwangi sebesar 278,43 Jiwa Perkembangan Jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Jawa Timur Pada Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
2014	38.610.202
2015	38.847.561
2016	39.075.152
2017	39.292.972
2018	39,500.085

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Pada tabel 4.1 menjelaskan data dari Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 - 2018 terjadi kenaikan yang signifikan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur juga diikuti bersama dengan kenaikan pada partisipasi angkatan kerja memiliki kontribusi dalam perekonomian. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan skill yang baik merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan pada era sekarang ini. Partisipasi angkatan

kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu tertentu. Data tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur di tunjukkan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 - 2018

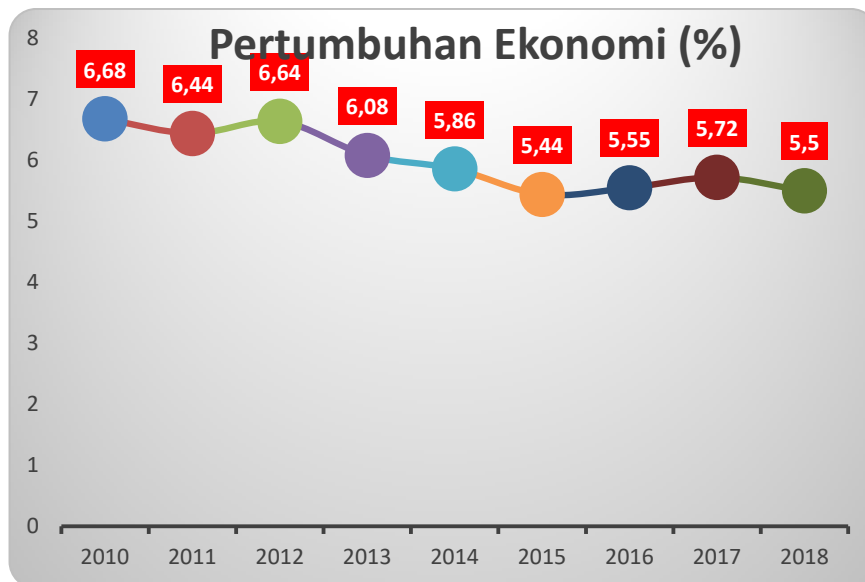
Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2014	68,12
2015	67,84
2016	66,14
2017	68,78
2018	69,37

Sumber : BPS Jawa Timur , 2019

4.1.3 Keadaan Perekonomian Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu yang perekonomiannya cukup baik. Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diatas nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% ditahun 2018, Jawa timur bisa untuk menjaga stabilitas makroekonimnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama sembilan tahun terakhir yang mengalami fluktuasi.

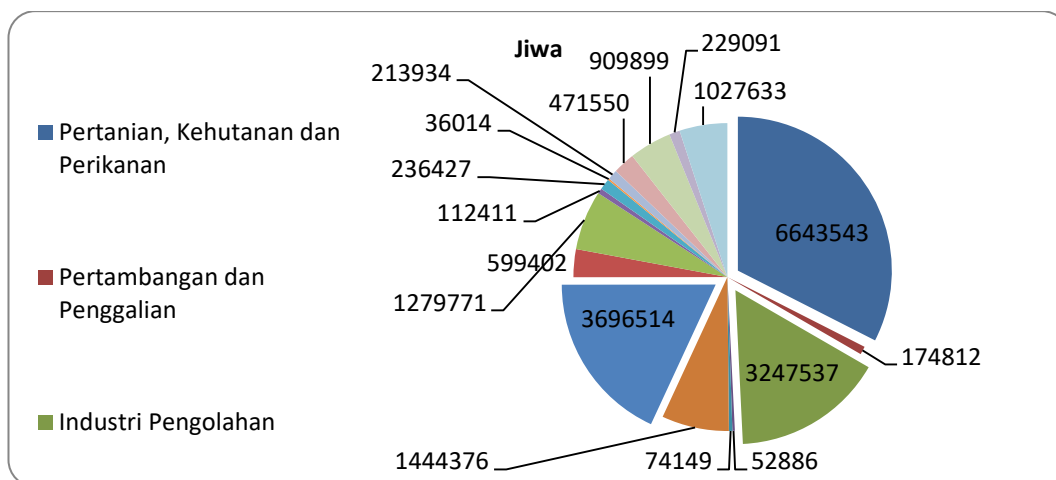
Gambar 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018



Sumber : BPS Jawa Timur 2019

Kondisi perekonomian yang membaik memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Dalam data ketenagakerjaan terakhir tahun 2018 69,37 % didampingi dengan tingkat pengangguran yang berada dalam fase tren menurun yaitu sebesar 3,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja semakin meningkat yang bermakna terjadi juga pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur di tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 4.3 sebagai berikut ini

Gambar 4.3
Sektor-Sektor Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : BPS Jawa Timur 2019

Pada gambar diatas menunjukkan dimana ada tiga sektor utama yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak yang pertama adalah pada sektor pertanian ditahun 2018 mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 66.435.43 jiwa. Tentu hal ini menunjukkan sektor pertanian,kehutanan,dan perikanan masih memiliki kontribusi yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang kedua yang mampu menyerap angkatan kerja cukup banyak ditahun 2018 adalah pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 36.965.14 Jiwa disusul dengan sektor yang ketiga yaitu industri pengolaan sebanyak 32.475.37 Jiwa. Pada sektor-sektor lain yang juga mampu menyerap tenaga kerja yaitu antara lain adalah kontruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan Transportasi dan perdagangan, Administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa keuangan dan asuransi maupun sektor lainnya.

4.1.4 Keadaan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan tingkat pengangguran tertentu berdasarkan jumlah pengangguran terbuka dalam wilayah. Di Provinsi Jawa Timur masalah pengangguran merupakan masalah yang harus perlu ditangani. Walaupun persentase tingkat pengangguran mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan selama periode 2014 - 2018.

Tabel 4.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
2014	4,19	4,19
2015	4,47	4,47
2016	4,21	4,21
2017	4	4
2018	3,99	3,99

Sumber : BPS Jawa Timur 2019

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh output total yang dihasilkan didalam batas wilayah atau Negara selama satu tahun yang mana PDRB adalah salah satu indikator penting untuk

mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga dasar berlaku maupun atas harga dasar konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh keseluruhan unit ekonomi di suatu daerah atau wilayah .

Tabel 4.4

PDRB Atas Harga Koston di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2018

KABUPATEN/KOTA		PDRB JATIM				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Pacitan	8582,2	9019,5	9489,7	9962,5	10511,4
2	Kab. Ponorogo	11104,5	11687,9	12305,7	12933,4	13619,6
3	Kab. Trenggalek	9998,5	10501,6	11026,5	11579,9	12161,9
4	Kab. Tulungagung	21265,2	22326,6	23446,4	24637,4	25920,2
5	Kab. Blitar	19920,2	20928,5	21991,4	23107,5	24286,2
6	Kab. Kediri	22890	24007,7	25211,9	26446,2	27789,5
7	Kab. Malang	52550,4	55317,8	58247,3	61408,9	64823,3
8	Kab. Lumajang	17851,9	18676,9	19555,2	20542,9	21574,2
9	Kab. Jember	41971,7	44222,6	46533,6	48913	51473
10	Kab. Banyuwangi	42005,7	44529,9	46924,6	49480,4	52370,6

Tabel Lanjutan 4.4

11	Kab. Bondowoso	10652,4	11179,6	11735,6	12325,7	12952,8
12	Kab. Situbondo	10572,4	11086,5	11640,8	12230,5	12894,2
13	Kab. Probolinggo	18682,2	19571	20504,1	21418,2	22375,2
14	Kab. Pasuruan	80105,4	84415,7	89011,2	94102	99553,4
15	Kab. Sidoarjo	106434	112013	118179,2	125039,1	132599
16	Kab. Mojokerto	44292	46792,3	49360,6	52192,8	55248,5
17	Kab. Jombang	21793,2	22960,2	24199,1	25497	26882
18	Kab. Nganjuk	14142,9	14875,4	15661,8	16485,6	17374,2
19	Kab. Madiun	10169,7	10704,9	11268,9	11879,3	12485
20	Kab. Magetan	10291,7	10823,9	11398,1	11978,1	12607,1
21	Kab. Ngawi	10681	11223,1	11807,6	12406,4	13059,3
22	Kab. Bojonegoro	39934,8	46892,8	57187,4	63056,5	65834,9
23	Kab. Tuban	35519,9	37256	39081,8	41037,7	43157,2
24	Kab. Lamongan	21099,9	22316,9	23623,8	24928	26299,9
25	Kab. Gresik	76336	81380,4	85850,1	90855,6	96276
26	Kab. Bangkalan	17369,2	16906,8	17018,6	17618,6	18368,9
27	Kab. Sampang	11632,9	11874,5	12606,8	13197,7	13793,2
28	Kab. Pamekasan	8846,2	9316,9	9815,8	10310,2	10873,5
29	Kab. Sumenep	21476,9	21750,6	22311,7	22949,7	23770,3
30	Kota Kediri	69232,9	72945,5	76988,4	80946,2	85336
31	Kota Blitar	3649,6	3856,9	4079,3	4315	4566,5
32	Kota Malang	39724,7	41952,1	44303,9	46824,8	49502,5
33	Kota Probolinggo	6261,9	6628,8	7018,3	7430,6	7871,8
34	Kota Pasuruan	4561,3	4813,3	5076,4	5354,1	5354,1
35	Kota Mojokerto	3774,6	3991,4	4221,8	4460,4	4460,4
36	Kota Madiun	7965,3	8455,4	8954,7	9486,1	9486,1
37	Kota Surabaya	305948	324215	343652,6	364714,8	387333,4
38	Kota Batu	8572,1	9145,9	9750,9	10390,8	11066,5
Total		1267863	1340564	1421042	1502444	1585912

Sumber BPS Jawa Timur 2018

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB Harga Konstan dari tahun 2014-2018 pada Provinsi Jawa Timur sebesar 5,8% dan

laju paling tinggi terjadi pada tahun 2014-2015 sebesar 6,0% sedangkan laju paling rendah terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 5,6%.

4.1.6 Analisis Data

4.1.6.1 Analisis Tipologi Klassen

Untuk melihat pola pembangunan setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada Penelitian ini, setiap Kabupaten akan diklasifikasikan menjadi empat golongan. Indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap Kabupaten yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk melihat pola pembangunan ekonomi setiap kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur 2014-2018

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$gi \geq g$	$gi < g$
si \geq s	Kuadran 1	Kuadran 2
	Kab. Pacitan	Kab. Pasuruan
	Kab. Ponorogo	Kab. Sidoarjo
	Kab. Trenggalek	Kab. Mojokerto
	Kab. Tulungagung	Kab. Madiun
	Kab. Blitar	Kota. Kediri
	Kab. Kediri	Kota. Malang
	Kab. Malang	Kota. Surabaya
	Kab. Lumajang	Kota. Batu
	Kab. Jember	
	Kab. Banyuwangi	
	Kab. Bondowoso	
	Kab. Situbondo	
	Kab. Probolinggo	
	Kab. Pasuruan	
	Kab. Sidoarjo	
Kab. Mojokerto		
si < s	Kuadran 3	Kuadran 4
	Kab. Trenggalek	Kab. Gresik
	Kab. Blitar	
	Kab. Kediri	
	Kab. Lumajang	
	Kab. Magetan	
	Kab. Bondowoso	
	Kab. Probolinggo	
	Kab. Bangkalan	
	Kab. Sampang	
	Kab. Sumenep	

Sumber: Hasil Analisis Tipologi Klassen (data diolah).

Dari Tabel diatas dapat dilihat Kabupaten/Kota mana saja yang masuk pada empat kriteria yang digunakan dalam analisis ini :

1. Kuadran I (pertama) yaitu Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab.

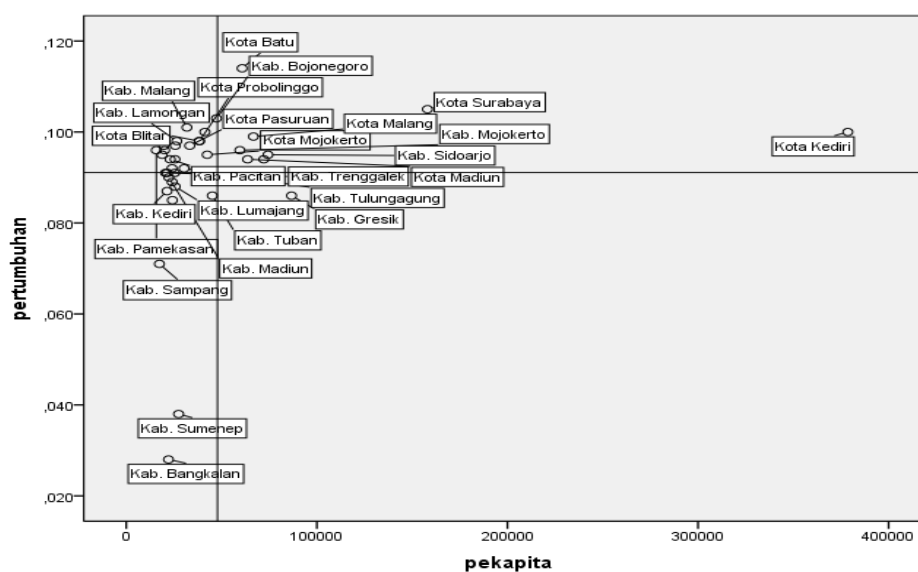
Situbondo, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Pamekasan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto.

2. Kuadran II (kedua) yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu .
3. Kuadran III (ketiga) yaitu Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Magetan, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep.
4. Kuadran IV (keempat) yaitu Kab. Gresik.

Dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada dalam Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2018 yang masuk dalam Sektor relative tertinggal (Kuadran IV) adalah Kabupaten Gresik.

Gambar 4.4

Kuadran Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur 2014-2018



4.2.2.2 Hasil Analisis Indeks Williamson

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus indeks Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018 cenderung meningkat, hal ini menandakan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah yang semakin meningkat. Sebaliknya bila indeks Williamson menurun berarti ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah juga menurun. Berdasarkan tabel 4.6 selama 5 tahun pengamatan indeks Williamson yang paling rendah pada tahun 2014 sebesar 0,589 Sedangkan tingkat ketimpangan paling tinggi pada tahun 2018 yakni 0,599. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6 Ketimpangan Jawa Timur 2014-2018

KETIMPANGAN JAWA TIMUR, 2014-2018					
Tahun	Total PDRB PEKAPITA	Total SIMPANGAN PROPOSI PENDUDUK $((y_i/y)^2)/(f_i/n)$	Akar Kuadrat	HASIL	IW Per Tahun
2014	47,86452188	793,9856	√	28,1778	0,589
2015	45,83706456	740,7112	√	27,2160	0,594
2016	43,78569136	678,9920	√	26,0575	0,595
2017	41,85015920	625,4968	√	25,0099	0,598
2018	40,08194376	576,9114	√	24,0190	0,599

Sumber: Hasil Analisis Indeks Williamson (data diolah).

Dengan demikian untuk pembangunan perkapita per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terjadi penurunan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018. Hal ini juga terjadi pada realisasi simpangan proposi penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menurun. Sedangkan tingkat ketimpangan cenderung

meningkat dari tahun ke tahun dan itu mendekati angka 1 yang berarti tingkat ketimpangan Jawa Timur, dari tahun 2014-2018 sangat tinggi.

Rata-rata tingkat ketimpangan yang ada dalam Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Ketimpangan Tiap Kabupaten di dalam Provinsi Jawa Timur dari 2014-2018
PDRB Atas Harga Koston

Kabupaten/Kota	PDRB RATA-RATA 2014-2018	Hasil Kuadran RATA-RATA 2014-2018 $((y_i/y)^2)/(f_i/n)$	KETIMPANGAN
Kab. Pacitan	58,3207829	1,185485826	0,02033
Kab. Ponorogo	70,7948924	2,515052831	0,03553
Kab. Trenggalek	62,8004277	1,672798925	0,02664
Kab. Tulungagung	43,8117266	0,011174559	0,00026
Kab. Blitar	52,3739839	1,060611466	0,02025
Kab. Kediri	61,7571373	2,387965265	0,03867
Kab. Malang	43,9971878	0,032447519	0,00074
Kab. Lumajang	52,8361057	1,054643146	0,01996
Kab. Jember	52,1139673	1,495114841	0,02869
Kab. Banyuwangi	34,173777	1,766648122	0,05170
Kab. Bondowoso	65,270513	1,950049932	0,02988
Kab. Situbondo	57,8614037	1,269921129	0,02195
Kab. Probolinggo	56,1530867	1,474656812	0,02626
Kab. Pasuruan	17,9065822	6,525049609	0,36439
Kab. Sidoarjo	18,1720855	7,448074468	0,40986
Kab. Mojokerto	22,0951633	4,074246343	0,18440
Kab. Jombang	51,6410231	1,017688145	0,01971
Kab. Nganjuk	66,8626533	2,422829984	0,03624
Kab. Madiun	60,2811777	1,467402972	0,02434
Kab. Magetan	55,2625489	1,025172382	0,01855
Kab. Ngawi	70,4113221	2,429285592	0,03450
Kab. Bojonegoro	23,5175486	4,027579449	0,17126
Kab. Tuban	29,6609995	2,368108456	0,07984

Kab. Lamongan	50,5326084	0,870031297	0,01722
Kab. Gresik	14,609329	7,21695867	0,49400
Kab. Bangkalan	55,1735375	1,269125852	0,02300
Kab. Sampang	75,2929433	2,961532202	0,03933
Kab. Pamekasan	87,2266497	3,609443409	0,04138
Kab. Sumenep	48,0020856	0,539081506	0,01123
Kota Kediri	3,67454	9,380863984	2,55294
Kota Blitar	34,1371207	0,523153939	0,01533
Kota Malang	19,3622744	4,341649087	0,22423
Kota Probolinggo	32,9894083	0,767053755	0,02325
Kota Pasuruan	39,1230682	0,289957037	0,00741
Kota Mojokerto	30,3544354	0,737961026	0,02431
Kota Madiun	19,8778508	1,901819249	0,09568
Kota Surabaya	8,34201303	17,525769	2,10090
Kota Batu	20,8133332	1,913249458	0,09192
Provinsi Jawa Timur	43,8838762	683,2194038	15,56880

Sumber: Hasil Analisis Indeks Williamson (data diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketimpangan Kabupaten/Kota yang paling tinggi terdapat pada wilayah Kota Kediri yaitu tingkat ketimpangan sebesar 2,552 melewati batas nilai 1. Dan disusul oleh wilayah Kota Surabaya dengan tingkat ketimpangan sebesar 2,100 juga melewati batas nilai 1. Adapun juga tingkat ketimpang paling kecil ada di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,00026 disusul oleh Kabupaten Pasuruan sebesar 0,00741.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama periode 2014-2018 menunjukkan ketimpangan semakin meningkat.
2. Pembangunan setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kuadran 4 adalah Kabupaten Gresik dalam Periode 2014-2018.
3. Ketimpangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan ketimpangan terendah terjadi di tahun 2014.
4. Ketimpangan yang ada dalam Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014-2018 paling tinggi adalah wilayah Kota Kediri yaitu tingkat ketimpangan sebesar 2,552 dan paling kecil ada di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,00026 .

5.2 SARAN

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan:

1. Meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif investasi sehingga investor mau menanamkan

modalnya. Investasi juga diarahkan pada daerah-daerah yang kurang maju dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung dalam berinvestasi.

2. Adanya ketimpangan pendapatan perkapita antar daerah menyebabkan pentingnya bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing sehingga diharapkan daerah yang tertinggal mampu mengejar daerah yang sudah maju. Agar penggunaan dana bantuan pembangunan optimal, perlu ditingkatkan peran pengawasan baik oleh institusi yang berwenang maupun masyarakat.

5.3 IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Gresik dalam tahun 2014-2018. Kabupaten Gresik masuk dalam kategori sebagai Kabupaten yang tertinggal. Hal ini harus diperhatikan pemerintah agar Kabupaten Gresik keluar dari wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kurung waktu 2014-2018 Ketimpangan semakin meningkat dan Kota Kediri mengalami ketimpangan tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2014). *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penaggulannya di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Azwar, e. a. (2013). *Economic Growth Disparity Among The Regions in Aceh, Indonesia*. AcehInternasional Journal of Social Science.
- Gama, A. (2009). *Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT)*, 2.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Manik, F. R. (2009). *Anaisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan dan Kabupaten Simagulun*.
- Michae P Todaro dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nahen, I. K. (2010). *Perekonomian Indonesia*. Diklat Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universtas Udayan, Bali.
- Rumangit, I. d. (2014). *Disparitas Pembangunan Ekonomi Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. *e-Journal Universitas Sam Ratulangi*, 4.
- Santosa, S. H. (2015). *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Media Trend*, 10.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di ndonesia*. Prisma LP3ES.
- Todaro, M. P. (1999). *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN 1

PDRB JAWA TIMUR MENURUT HARGA BERLAKU 2014-2018										
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH					LAJU (%)				RATA - RATA PERTUMBUHAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1 Kab. Pacitan	10492,2	11590,6	12767,1	13810,3	15010,8	0,105	0,102	0,082	0,087	0,094
2 Kab. Ponorogo	13394,1	14916,0	16419,2	17760,4	19257,5	0,114	0,101	0,082	0,084	0,095
3 Kab. Trenggalek	12297,0	13636,8	14915,8	16116,7	17395,5	0,109	0,094	0,081	0,079	0,091
4 Kab. Tulungagung	25780,6	28415,3	31126,1	33740,2	36623,0	0,102	0,095	0,084	0,085	0,092
5 Kab. Blitar	24140,6	26779,7	29335,1	31654,4	34203,4	0,109	0,095	0,079	0,081	0,091
6 Kab. Kediri	27755,2	30497,5	33211,4	35869,5	38721,8	0,099	0,089	0,080	0,080	0,087
7 Kab. Malang	65930,9	73841,9	81784,4	89129,2	96998,0	0,120	0,108	0,090	0,088	0,101
8 Kab. Lumajang	21983,1	24417,1	26651,8	28702,8	30772,0	0,111	0,092	0,077	0,072	0,088
9 Kab. Jember	50602,1	56377,4	62512,7	67475,0	72312,5	0,114	0,109	0,079	0,072	0,094
10 Kab. Banyuwangi	53371,2	60179,3	66346,0	72243,0	78037,3	0,128	0,102	0,089	0,080	0,100
11 Kab. Bondowoso	13075,1	14485,6	15862,6	17156,7	18527,1	0,108	0,095	0,082	0,080	0,091
12 Kab. Situbondo	13338,8	14795,7	16280,8	17545,0	18930,3	0,109	0,100	0,078	0,079	0,092
13 Kab. Probolinggo	23158,0	25688,6	28067,4	29991,6	32049,8	0,109	0,093	0,069	0,069	0,085
14 Kab. Pasuruan	94881,6	104778,4	114882,8	124979,8	135969,4	0,104	0,096	0,088	0,088	0,094
15 Kab. Sidoarjo	131645,8	146080,9	160020,7	174280,1	189282,0	0,110	0,095	0,089	0,086	0,095
16 Kab. Mojokerto	53203,6	59184,9	65115,8	70863,2	76768,6	0,112	0,100	0,088	0,083	0,096
17 Kab. Jombang	26339,1	29148,0	31982,9	34939,8	38085,1	0,107	0,097	0,092	0,090	0,097
18 Kab. Nganjuk	17243,8	19122,2	21113,9	22892,1	24879,4	0,109	0,104	0,084	0,087	0,096
19 Kab. Madiun	12532,1	13901,5	15227,0	16417,7	17679,1	0,109	0,095	0,078	0,077	0,090
20 Kab. Magetan	12564,0	13880,1	15196,4	16343,4	17673,2	0,105	0,095	0,075	0,081	0,089
21 Kab. Ngawi	13311,8	14994,5	16529,6	17810,4	19241,8	0,126	0,102	0,077	0,080	0,097
22 Kab. Bojonegoro	50533,9	48606,5	55581,4	64886,2	73888,8	-0,038	0,143	0,167	0,139	0,103
23 Kab. Tuban	43801,5	48137,7	52307	56500,9	60844,0	0,099	0,087	0,080	0,077	0,086
24 Kab. Lamongan	25704,5	28746,2	31707,3	34370,5	37332,7	0,118	0,103	0,084	0,086	0,098
25 Kab. Gresik	93797,7	100723,8	107876,6	118619,2	130608,8	0,074	0,071	0,100	0,101	0,086
26 Kab. Bangkalan	21708,6	19198,9	20134,4	21674,6	23886,9	-0,116	0,049	0,076	0,102	0,028
27 Kab. Sampang	14628,3	14697,2	16245,0	17707,3	19229,2	0,005	0,105	0,090	0,086	0,071
28 Kab. Pamekasan	11067,1	12299,3	13528,0	14640,6	15952,1	0,111	0,100	0,082	0,090	0,096
29 Kab. Sumenep	28311,4	27156,1	28970,7	30578,2	32743,7	-0,041	0,067	0,055	0,071	0,038
30 Kota Kediri	87704,2	95865,2	106396,5	116060,2	128293,4	0,093	0,110	0,091	0,105	0,100
31 Kota Blitar	4354,3	4819,1	5331,3	5802,4	6319,5	0,107	0,106	0,088	0,089	0,098
32 Kota Malang	46563,2	51824,4	57170,6	62359,3	67934,9	0,113	0,103	0,091	0,089	0,099
33 Kota Probolinggo	7260,7	8072,1	8888,1	9680,0	10542,4	0,112	0,101	0,089	0,089	0,098
34 Kota Pasuruan	5346,1	5949,4	6559,0	7125,2	7727,9	0,113	0,102	0,086	0,085	0,097
35 Kota Mojokerto	4427,1	4881,6	5370,4	5848,2	6353,9	0,103	0,100	0,089	0,086	0,095
36 Kota Madiun	9214,1	10192,1	11184,1	12131,9	13190,4	0,106	0,097	0,085	0,087	0,094
37 Kota Surabaya	365350,9	406223,5	451383,2	495026,3	544594,5	0,112	0,111	0,097	0,100	0,105
38 Kota Batu	10259,7	11510,4	12901,7	14351,5	15801,0	0,122	0,121	0,112	0,101	0,114
TOTAL	1547074	1695615,5	1866884,8	2037084	2223661,7	3,511	0,101	0,091	0,092	0,949

LAMPIRAN 2

PDRB PERKAPITA JAWA TIMUR MENURUT HARGA BERLAKU 2014-2018							
KABUPATEN/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA PERKAPITA	
1	Kab. Pacitan	19094,1	21035,6	23116,3	24955,4	27075,8	23055,44
2	Kab. Ponorogo	15470,2	17196,3	18898,7	20416,6	22117,3	18819,82
3	Kab. Trenggalek	17904,8	19783,4	21576,5	23253	25033,2	21510,18
4	Kab. Tulungagung	25374,6	27825,4	30334,4	32732	35374,3	30328,14
5	Kab. Blitar	21161,1	23380,2	25515,4	27434,9	29549,4	25408,2
6	Kab. Kediri	18035,8	19715,2	21366,1	22972,7	24693,5	21356,66
7	Kab. Malang	26089,5	29022,5	31938,3	34591,8	37425,0	31813,42
8	Kab. Lumajang	21417,7	23701,3	25783,0	27684,1	29594,1	25636,04
9	Kab. Jember	21131,8	23421,3	25842,4	27765,2	29627,8	25557,7
10	Kab. Banyuwangi	33607,0	37751,3	41471,4	45014	48479,4	41264,62
11	Kab. Bondowoso	17272,3	19030,0	20732,8	22313,3	23989,5	20667,58
12	Kab. Situbondo	20028,3	22093,0	24180,5	25927,3	27838,7	24013,56
13	Kab. Probolinggo	20444,9	22523,9	24449,0	25962,3	27579,2	24191,86
14	Kab. Pasuruan	60453,4	66240,0	72085,6	77854,5	84108,2	72148,34
15	Kab. Sidoarjo	63172,8	68993,9	74410,9	79809,5	85385,2	74354,46
16	Kab. Mojokerto	49699,7	54780,6	59733,8	64450,4	69242	59581,3
17	Kab. Jombang	21335,8	23487,5	25641,7	27882,7	30259,9	25721,52
18	Kab. Nganjuk	16617,3	18356,8	20197,0	21826,9	23651,8	20129,96
19	Kab. Madiun	18593,5	20561,2	22458,6	24122,4	25945,3	22336,2
20	Kab. Magetan	20051,1	22123,3	24198,1	25991,4	28101,8	24093,14
21	Kab. Ngawi	16081,0	18091,8	19927,2	21460,9	23180,1	19748,2
22	Kab. Bojonegoro	41004,5	39306,5	44809,2	52163,5	59258,0	47308,34
23	Kab. Tuban	38184,6	41753,6	45154,6	48556,9	52079,1	45145,76
24	Kab. Lamongan	21653,2	24201,2	26685,1	28919,2	31401,1	26571,96
25	Kab. Gresik	75545,8	80174,9	84895,4	92310,7	100545,7	86694,5
26	Kab. Bangkalan	22952,7	20118,3	20912,3	22324,2	24401,8	22141,86
27	Kab. Sampang	15799,0	15688,8	17143,3	18481,7	19854,6	17393,48
28	Kab. Pamekasan	13234,9	14550,2	15837,1	16964,7	18304,1	15778,2
29	Kab. Sumenep	26528,7	25329,8	26904,5	28281,8	30172,9	27443,54
30	Kota Kediri	315369,1	342375,9	377292,4	408662,7	449206,6	378581,34
31	Kota Blitar	31806,3	34946,5	38327,0	41445,5	44819,0	38268,86
32	Kota Malang	55039,3	60876,8	66756,9	72393,0	78437,7	66700,74
33	Kota Probolinggo	32013,8	35249,4	38460	41527,4	44823,3	38414,78
34	Kota Pasuruan	27656,9	30541,2	33430,2	36040,4	38814,1	33296,56
35	Kota Mojokerto	35502,0	38835,2	42487,1	45940,6	49523,5	42457,68
36	Kota Madiun	52833,1	58240,4	63690,8	68892,1	74648,5	63660,98
37	Kota Surabaya	128921,6	142604,6	157694,0	172201,0	188728,3	158029,9
38	Kota Batu	51660,2	57408,4	63775,00	70350,3	76 778,5	60798,475
39	TOTAL	1528742,4	1661316,2	1818113	1969877	2063270	1820423,295

LAMPIRAN 3

Ketimpangan Provinsi Jawa Timur dari 2014-2018 PDRB Atas Harga Kostan Per Tahun											
KABUPATEN/KOTA	PDRB PERKAPITA (JUTA) $y_i(f/n)$					KUADRAN SIMPANGAN PROPOSI PENDUDUK $((y_i/y)^2)/(f/n)$					
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kab. Pacitan	64,0256578	61,0883087	58,2006807	55,5471016	52,7421656	1,7679499	1,5649681	1,3876321	1,2439915	1,0623415
2	Kab. Ponorogo	77,9692017	74,2129039	70,6025663	67,2594987	63,9302916	7,9376986	7,0201502	6,2275305	5,5577791	4,8842954
3	Kab. Trenggalek	68,6884033	65,6280948	62,6939645	59,8540575	57,1376183	3,4196825	3,0683490	2,7741799	2,4982721	2,2307977
4	Kab. Tulungagung	47,7763670	45,7387153	43,7636908	41,8384245	39,9414356	0,0001303	0,0001611	0,0000080	0,0000023	0,0003227
5	Kab. Blitar	57,2681499	54,7290059	52,2799822	49,9319701	47,6608115	1,3893515	1,2343655	1,1166070	1,0045514	0,8796080
6	Kab. Kediri	67,2314985	64,4327861	61,6528306	59,0403158	56,4282553	6,7716892	6,1928293	5,6638120	5,2014541	4,6821060
7	Kab. Malang	48,0888252	45,9945081	43,9621236	41,9580224	39,9824600	0,0020853	0,0010229	0,0012759	0,0004755	0,0004045
8	Kab. Lumajang	57,4940483	55,1586719	52,8605179	50,4711117	48,1961788	1,3056353	1,2105950	1,1332667	1,0161880	0,8956758
9	Kab. Jember	57,0529190	54,4317837	51,9839428	49,6838264	47,4173644	2,7948831	2,4368014	2,2009102	1,9978200	1,7464273
10	Kab. Banyuwang	37,8063453	35,7980368	34,0932262	32,4350046	30,7362719	3,3517707	3,3477075	3,1021464	2,9193754	2,8842279
11	Kab. Bondowoso	71,0627652	68,0887509	65,1942807	62,3828261	59,6239423	4,5215281	4,1291875	3,7850760	3,4586303	3,1190518
12	Kab. Situbondo	62,9954410	60,4079737	57,8381211	55,3291362	52,7363466	1,9091136	1,7558210	1,6176288	1,4789718	1,3019631
13	Kab. Probolinggo	60,6293691	58,2739768	55,9893875	53,9360917	51,9366084	2,4009705	2,2581388	2,1489024	2,0823087	1,9827431
14	Kab. Pasuruan	19,5930237	18,7380665	17,9042974	17,0592230	16,2383002	50,4994921	46,2425925	41,9578465	38,4934230	35,6880079
15	Kab. Sidoarjo	19,5794401	18,9020997	18,1967893	17,4639933	16,7181050	67,1620673	60,6196394	54,4549745	49,4919665	45,6404188
16	Kab. Mojokerto	24,1688341	23,0890339	22,0839090	21,0662007	20,0678389	19,6151439	18,0623596	16,3592898	15,0061385	13,9544846
17	Kab. Jombang	56,6461557	54,0493985	51,5433632	49,1460956	46,8201027	1,3255595	1,1551047	1,0248380	0,9033436	0,7696000
18	Kab. Nganjuk	73,3741312	70,0294446	66,7467979	63,6190979	60,5437948	7,2589475	6,4943894	5,8105937	5,1997336	4,5868615
19	Kab. Madiun	66,2741280	63,1567787	60,1649673	57,2330019	54,5770124	2,7184710	2,3953917	2,1274734	1,8709659	1,6540555
20	Kab. Magetan	60,8853737	57,9655207	55,0954984	52,4798591	49,8864925	1,3762378	1,1877015	1,0259733	0,9008070	0,7641725
21	Kab. Ngawi	77,5048216	73,8461744	70,2496697	66,8928134	63,5631313	7,4012431	6,5678606	5,8192244	5,1785517	4,5402627
22	Kab. Bojonegoro	30,8599517	26,3709354	21,6897953	19,7268481	18,9402126	9,1077353	13,2549424	19,6479298	20,5414896	18,5548840
23	Kab. Tuban	32,2944884	30,9457537	29,6397300	28,3547567	27,0702687	6,7916984	6,1627502	5,5034205	4,9745811	4,6072380
24	Kab. Lamongan	56,2601718	53,2240141	50,2964383	47,6764281	45,2059894	1,1730502	0,9083989	0,7047005	0,5632099	0,4354126
25	Kab. Gresik	16,2651043	14,3439084	14,8014038	14,1435200	13,4927085	60,1194675	60,2094520	50,7527141	46,4217192	42,9191095
26	Kab. Bangkalan	54,4539184	56,4450399	56,5718097	55,1061946	53,2907251	0,5948380	1,4191846	1,9579179	2,0606324	2,0208293
27	Kab. Sampang	79,5941683	78,8918270	75,1668941	72,5946188	70,2172085	9,2373208	9,6782290	8,7364951	8,3029763	7,8983436
28	Kab. Pamekasan	94,5291764	90,7291052	87,0223517	83,7039049	80,1487102	15,1935910	14,0062737	12,9128823	12,0209163	11,0067453
29	Kab. Sumenep	49,6906909	49,2911920	48,2618985	47,1119012	45,6547456	0,0564912	0,1935800	0,3145909	0,4229002	0,4654819
30	Kota Kediri	4,0164719	3,8385370	3,6626037	3,5085279	3,3465595	104,9882412	95,9796396	87,2182152	79,2026041	72,6143453
31	Kota Blitar	37,5117821	35,7561772	34,1031550	32,4438007	30,8706887	0,3085201	0,2923805	0,2691269	0,2541123	0,2443105
32	Kota Malang	21,2958940	20,2921427	19,3303524	18,3965335	17,4964497	22,1170117	20,4209218	18,6458652	17,1434306	15,9223547
33	Kota Probolinggo	36,2153659	34,5481837	32,9299118	31,3733750	29,8802053	0,6702281	0,6301576	0,5820324	0,5428523	0,5165869
34	Kota Pasuruan	42,3846272	40,4743108	38,6498306	36,9242263	37,1823462	0,1080340	0,1032598	0,0942270	0,0864700	0,0283846
35	Kota Mojokerto	33,0416468	31,4942126	29,9407836	28,5353332	28,7602009	0,6541290	0,6125038	0,5694702	0,5263161	0,3605134
36	Kota Madiun	21,8915797	20,6962415	19,6105956	18,5638988	18,6269384	4,2381078	3,9866272	3,6828214	3,4236473	2,7533785
37	Kota Surabaya	9,2627757	8,7860871	8,3293594	7,8820465	7,4497965	359,5741985	332,0054327	304,0188087	280,0902850	260,0741708
38	Kota Batu	23,1691184	21,9207514	20,7487514	19,6324633	18,5955813	4,1233201	3,9023605	3,6415602	3,4138846	3,2214920
TOTAL		47,8645219	45,8370646	43,7856914	41,8501592	40,0819438	793,9856337	740,7112307	678,9919681	625,4967775	576,9114092
		√					28,1777507	27,2160106	26,0574743	25,0099336	24,0189802
Indeks Williamson Ketimpangan Jawa Timur, 2014-2018 Per Tahun							0,589	0,594	0,595	0,598	0,599

